



PERAN SERTA MASYARAKAT PEMANFAAT PESISIR DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TELUK AMBON DALAM

Lilian Sarah Hiariey (lilian@ut.ac.id)
Universitas Terbuka

Nesti Rostini Romeon
Penyuluh Perikanan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Maluku

ABSTRAK

Wilayah Teluk Ambon Dalam (TAD) merupakan wilayah pesisir dengan berbagai kegiatan seperti perikanan, industri, pelabuhan, dan ekonomi (pasar). Kompleksitas kegiatan pemanfaatan pesisir mendorong terjadinya degradasi kerusakan dan pencemaran pesisir. Kondisi ini mendorong perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian dilakukan untuk menganalisa tingkat kepentingan masyarakat terhadap kegiatan pemanfaatan pesisir dan faktor-faktor yang membedakan tingkat peran serta masyarakat sehingga diketahui konsep model peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir. Populasi penelitian adalah masyarakat yang tinggal di kawasan TAD yang memanfaatkan lahan pesisir secara teratur untuk kegiatan atau usahanya. Sampel yaitu individu yang menjadi pelaku, terlibat dan berperan secara langsung dalam kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD. Penentuan sampel dengan cara proporsional. Analisis yang dilakukan dalam penelitian adalah analisis responden, untuk mengetahui tingkat kepentingan masyarakat terhadap kegiatan pemanfaatan pesisir dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis faktor-faktor yang membedakan tingkat peran serta masyarakat dengan menggunakan analisis diskriminan, dan analisis strategi pengelolaan wilayah pesisir dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) pada wilayah pesisir TAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan di pesisir TAD memiliki tingkat kepentingan yang tinggi yang ditunjukkan dengan besarnya pengaruh kegiatan pemanfaatan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak terhadap sumber daya pesisir akibat kegiatan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan menjadi ancaman yang serius, sedangkan tingkat peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir rendah, yang ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat pada tahap implementasi dan pemantauan. Faktor-faktor yang membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat pemanfaat pesisir adalah pendidikan, persepsi, dan pendapatan, sedangkan faktor umur tidak berperan signifikan dalam membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat. Strategi yang diperoleh yaitu menggunakan konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (co-management) dimana masyarakat memiliki kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan.

Kata kunci: peran serta, proses pengelolaan, SWOT

ABSTRACT

Inner Ambon Bay (TAD) is a coastal region where there are a variety of beneficiary activities such as fisheries, industry, ports, and market. Complexity of activities are forcing the degradation and pollution of coastal. The study was conducted to analyze the level of public participation interest towards the utilization of coastal activities and the factors that differentiate the level of community participation so that the concept of utilizing coastal community participation model in coastal area management is known. These conditions encourage the need for community participation in coastal area management. The population is the people who live in the areas that utilize coastal TAD regularly for any activity or business. The samples are individuals who become actors, involved, contribute directly to the activities in coastal areas TAD. The sampling method is proportional. Analysis conducted in this study is the analysis of the respondents to determine the level of public participation interest towards the utilization of coastal activities by using descriptive analysis, analysis of the factors that differentiate the level of community participation by using discriminant analysis, and analysis of coastal area management strategies by identifying the factors of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) in the coastal area of TAD. The results showed that the utilization in the coastal of TAD having a high level of interest shown by the level of the effect of utilization of the economic activities of society, but the impact on coastal resources due to unsustainable use activities that pose a serious. The level of participation of beneficiary communities in the coastal area management is low that can be indicated by the involvement of community in the implementation and monitoring phase. The factors that differentiate the level of participation of coastal communities are the beneficiaries of education, perception, and revenues received, while the age factor does not play a significant role in distinguishing the level of public participation. Strategy is obtained by using the concept of co-management in which the public has sufficient authority in the management and accomandabed of the interests of the community in the management process.

Keywords: community participation, management process, SWOT

Di wilayah pesisir Teluk Ambon Dalam (TAD) terdapat ekosistem dan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, yang selama ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan protein dan bahan-bahan atau material bangunan. Terdapat kecenderungan pemanfaatan yang bersifat eksploitatif, serta perusakan, dan pencemaran ekosistem dan sumber daya yang makin meningkat, yang tidak menjamin ketersediaan sumber daya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Degradasi lingkungan dan sumber daya itu terjadi pada kawasan pasang surut (*meti*), mangrove, lamun, terumbu karang, serta daerah aliran sungai hingga ke arah hulunya .

Pemukiman penduduk yang semakin padat, kondisi topografi daratan yang memiliki kemiringan relatif terjal serta arus lalu lintas laut yang semakin padat akan berdampak pada tekanan ekologis perairan TAD. Terdapat berbagai kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD, seperti pelabuhan berbagai jenis kapal niaga dan kapal penangkapan, industri perikanan, pangkalan angkatan laut, budidaya karamba apung, penangkapan ikan, pemukiman penduduk, dan pembangkit listrik tenaga diesel. Memperhatikan perkembangan berbagai kegiatan tersebut yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, serta dampak yang ditimbulkan di perairan TAD, dapat diperkirakan perairan ini akan semakin tertekan dan tercemar. Indikasi tersebut sudah mulai nampak, yaitu pada

beberapa tempat terjadi penyempitan karena proses sedimentasi yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan seperti pemukiman, reklamasi, pelabuhan, pusat perdagangan, pasar dan lain-lain, dan hal ini pada akhirnya akan merusak ekosistem di perairan ini seperti mangrove, terumbu karang dan lamun yang akan diikuti oleh menurunnya keanekaragaman biota yang hidup di dalamnya (Pelasula, 2009).

Mengingat sifat alamiah wilayah pesisir dan aktivitas masyarakat pesisir yang dinamis serta kompleks, pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir mengharuskan pendekatan secara terpadu, rasional, dan optimal yang mencakup peran serta masyarakat di dalamnya. Selanjutnya pendekatan yang tidak memperhatikan interaksi antara prinsip ekologi dan perilaku (budaya) masyarakat, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berakibat pada perusakan wilayah pesisir.

Akar permasalahan ini berasosiasi dengan faktor sosial-ekonomi-budaya dan bio-fisik yang mempengaruhi kondisi wilayah pesisir. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Bertolak dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: tingkat kepentingan masyarakat pemanfaat pesisir terhadap kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD; faktor-faktor yang membedakan tingkat peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir TAD; serta merumuskan strategi yang paling tepat sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan) TAD.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah di Teluk Ambon Dalam. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Juli 2011. Populasi penelitian adalah masyarakat yang tinggal di kawasan TAD yang memanfaatkan lahan pesisir secara teratur untuk kegiatan atau usahanya, sedangkan sampel adalah individu yang menjadi pelaku, terlibat, berperan secara langsung dalam kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD. Penentuan sampel dengan cara *proporsional* dengan beberapa kategori, yaitu: distribusi jenis pemanfaatan, *cluster*, dan stratifikasi. Jumlah sampel sebanyak 55 responden yang terdiri atas 8 orang dari kegiatan industri, 30 orang dari kegiatan perikanan, dan 17 orang dari kegiatan ekonomi (pasar). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur.

Tabel 1. Analisis Data Diskriptif

No	Jawaban pertanyaan	Bobot Jawaban
		Strength (+)
(1)	(2)	(3)
1	A	5
2	B	3
3	C	1
	\sum bobot	9
	Batasan Tingkat Kepentingan	\geq (Penting) $<$ (Tidak Penting)

Keterangan : N = Jumlah pilihan jawaban = 3

$$\sum x_i = \text{Jumlah bobot} = 9$$

$$X = \text{Rata-rata} = \left(\frac{\sum x_i}{N} \right) = \left(\frac{9}{3} \right) = 3$$

Analisis data yang digunakan untuk masyarakat menggunakan analisis diskriptif, dengan menghitung rata-rata (*mean*) pada setiap pertanyaan yang diberikan kepada responden (Sugiyono, 2002) seperti pada Tabel 1. Sedangkan faktor-faktor yang membedakan tingkat peran serta masyarakat menggunakan analisis diskriminan, dan strategi peran serta masyarakat menggunakan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepentingan Responden Terhadap Kegiatan Perikanan

Deskripsi hasil penelitian mengenai kegiatan perikanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum sejauh mana tingkat kepentingan responden terhadap kegiatan perikanan yang ada di wilayah pesisir TAD. Tingginya konsumsi ikan di Kota Ambon merupakan salah satu indikator yang positif terhadap peningkatan permintaan masyarakat (Anonim, 2009). Berdasarkan hal tersebut, maka peran nelayan untuk suplai ikan bagi masyarakat kota Ambon khususnya TAD sangat penting. Selain itu, semakin penting perhatian nelayan terhadap kondisi permukiman, maka semakin besar upaya nelayan untuk memperbaiki kesan kumuh pada daerah tersebut guna mewujudkan kesejahteraan nelayan, sehingga kepentingan nelayan terhadap kegiatan perikanan menjadi tinggi. Semakin pentingnya peran nelayan dan penataan kondisi permukiman nelayan, maka semakin besar pula upaya yang dilakukan oleh nelayan terhadap kegiatan perikanan.

Berdasarkan hasil analisis diskriptif terhadap 2 pertanyaan yang diberikan responden yaitu peran nelayan untuk suplai ikan di wilayah pesisir TAD dan kondisi permukiman nelayan masing-masing memiliki skor rata-rata lebih dari 3 yaitu 3,73 dan 3,87 yang berarti memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan perikanan. Tingginya tingkat kepentingan terhadap kegiatan perikanan menunjukkan kegiatan ini memiliki pengaruh besar terhadap aktifitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, namun di sisi lain mereka tidak mampu mengembangkan sumber daya perikanan dengan baik. Hal ini sangat berkaitan dengan keterbatasan modal sehingga nelayan tidak dapat berperan secara baik dalam suplai ikan bagi masyarakat pesisir TAD dan sekitarnya. Selain itu juga karena pencemaran dan sedimentasi mengakibatkan perubahan kualitas perairan TAD sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan.

Anonim (2009) menyatakan banyaknya sedimentasi di TAD yang turun dari darat ke laut dan mengendap dari pinggir pantai mencapai kedalaman 40 hingga 60 cm mengakibatkan tanaman lamun tidak dapat bernafas dengan baik dan berpengaruh pada biota laut lainnya seperti ikan pelagis akan berpindah tempat ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, sedimentasi mengakibatkan pedangkalan yang nantinya berdampak terhadap ekosistem pesisir. Biota-biota perairan dangkal kehilangan habitat, padahal biota laut dangkal merupakan sumber makanan utama ikan-ikan di laut. Jika kehilangan makanan, populasi ikan menyusut sehingga jumlah tangkapan nelayan berkurang.

Tingkat Kepentingan Responden Terhadap Kegiatan Industri

Deskripsi hasil penelitian mengenai kegiatan industri dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum sejauh mana tingkat kepentingan responden terhadap kegiatan industri yang ada di wilayah pesisir TAD. Industri yang ada di TAD yaitu PLTD Poka, Perusahaan *Coldstorage* dan PT. ASDP Ambon. Sumber minyak yang mencemari TAD berasal dari PLTD serta yang berasal dari daratan yang masuk melalui beberapa sungai. Kandungan minyak sebesar 39.12 ppm ditemukan di sekitar Galala (Anonim, 2008). Industri yang bergerak di bidang perikanan adalah *Coldstorage*. Pada dasarnya *coldstorage* mengelola masukan yang berupa hasil laut atau perikanan dengan teknik pendinginan dan menghasilkan air buangan yang mengandung bahan tersuspensi, bahan koloid dan bahan organik terlarut dengan konsentrasi yang tinggi (Suratmo, 1995). Limbah cair di kawasan TAD tidak tertangani dengan baik sehingga mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas air dan berdampak terhadap sumber daya pesisir. Hal ini membutuhkan biaya dalam pengelolaan limbahnya, antara lain diperlukan tempat pembuangan yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil analisis diskriptif diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap keberadaan kawasan industri dan kewajiban industri mengolah limbahnya secara baik, masing-masing memiliki skor rata-rata lebih dari 3 yaitu 3,84 dan 3,69. Dengan demikian kegiatan industri memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Tingginya tingkat kepentingan terhadap kegiatan industri tampak pada kegiatan pemanfaatan industri listrik yang memberikan suplai energi, industri feri berperan sebagai transportasi laut. Selain itu perusahaan *coldstorage* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk perikanan dan juga dapat menyerap tenaga kerja. Masyarakat masih berharap banyak terhadap kegiatan industri untuk dapat meningkatkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan. Namun di sisi lain kewajiban industri untuk mengolah limbahnya secara baik juga dirasa penting, agar buangan limbah industri tidak mencemari lingkungan pesisir.

Dahuri, Rais, Ginting, & Sitepu (2004), menyatakan penentuan lokasi industri di suatu wilayah pesisir hendaknya harus melalui pengkajian tentang pengaruhnya terhadap lingkungan. Penempatan lokasi untuk kegiatan dan pengembangan industri sebaiknya berada di daerah yang tidak mempunyai nilai ekologis penting. Selain itu, semua jenis industri harus mendirikan fasilitas pengolahan limbah untuk meminimalkan pengaruhnya terhadap degradasi lingkungan wilayah pesisir.

Tingkat Kepentingan Responden Terhadap Kegiatan Ekonomi (Pasar)

Deskripsi hasil penelitian mengenai kegiatan ekonomi (pasar) dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum sejauh mana tingkat kepentingan responden terhadap kegiatan ekonomi(pasar) yang ada di wilayah pesisir TAD. Berdasarkan hasil analisis diskriptif terhadap keberadaan pasar bagi masyarakat pesisir TAD dan kewajiban pedagang mengelola limbah dengan baik masing-masing memiliki skor lebih dari 3 yaitu 3,98 dan 3,69, sehingga dapat disimpulkan kegiatan ekonomi (pasar) di wilayah pesisir TAD memiliki tingkat kepentingan tinggi. Namun di sisi lain, sampah yang dihasilkan oleh aktivitas di pasar tidak dikelola dengan baik dan merupakan sumber pencemaran sehingga sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan sumber daya pesisir sekitarnya. Hal ini didukung dengan kurangnya kesadaran dan minimnya peran serta masyarakat tentang penanggulangan sampah, serta terbatasnya sarana pembuangan sampah yang tersedia pasar.

Dahuri, et al (2004), menyatakan bahwa pembuangan limbah pada lahan atas dapat menimbulkan dampak negatif di wilayah pesisir. Hal ini menyebabkan terjadinya sedimentasi dan dibawa oleh aliran sungai ke wilayah pesisir. Pemilihan dan penentuan lokasi pembuangan harus dilakukan sedemikian rupa dan harus mendapat pengawasan ketat, sehingga dalam operasinya

mampu mencegah terjadinya pencemaran badan air dan merusak lingkungan daerah vital karena daerah vital mempunyai fungsi terhadap stabilitas ekosistem wilayah pesisir.

Tingkat Kepentingan Responden Terhadap Kegiatan Kepelabuhanan

Deskripsi hasil penelitian mengenai kegiatan kepelabuhanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum sejauh mana tingkat kepentingan responden terhadap kegiatan kepelabuhanan yang ada di wilayah pesisir TAD. Pelabuhan yang ada di TAD umumnya tidak dikelola dengan baik terutama dari aspek penanganan limbah pelabuhan. Dari aspek penataan kawasan berdasarkan analisis ruang kondisi ini tidak efektif. Hal ini akan memberikan tekanan yang kuat terhadap kawasan pesisir TAD (Anonim, 2009).

Berdasarkan hasil analisis diskriptif terhadap 2 pertanyaan yaitu keberadaan dermaga dan kegiatan keluar masuk kapal atau ferry masing-masing memiliki skor lebih dari 3 yaitu 3,40 dan 3,15. Hal ini menunjukkan tingkat kepentingan masyarakat terhadap kegiatan kepelabuhanan tinggi. Kegiatan kepelabuhanan secara umum tidak mengganggu kegiatan yang lain, namun pencemaran di sekitar lokasi pelabuhan perlu diperhatikan agar tidak berdampak terhadap ruang tangkapan nelayan dan tidak mencemari sumber daya pesisir sekitarnya.

Anonim (2008), memaparkan bahwa sumber minyak yang mencemari Teluk Ambon sebagian besar berasal dari hasil buangan kapal speedboat yang masuk, berlabuh, dan penyeberangan dari dan masuk ke teluk, pelabuhan dermaga laut, serta yang berasal dari daratan yang masuk melalui beberapa sungai. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas perairan dan sangat potensial untuk merusak habitat dan kehidupan organisme air, terutama yang bersifat rentan seperti telur dan larva ikan dan udang.

Tingkat Kepentingan Responden Terhadap Kegiatan Pengurugan atau Reklamasi

Deskripsi hasil penelitian mengenai kegiatan pengurugan atau reklamasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum sejauh mana tingkat kepentingan responden terhadap kegiatan pengurugan atau reklamasi yang ada di wilayah pesisir TAD. Sebagian besar tanggapan responden terhadap kegiatan reklamasi untuk kepentingan permukiman, industri, dan pelabuhan sangat penting.

Berdasarkan hasil analisis diskriptif terhadap kegiatan reklamasi untuk kepentingan permukiman, industri, dan pelabuhan memiliki skor lebih dari 3 yaitu 3,15. Hal ini menunjukkan pendapat responden terhadap kegiatan pengurugan atau reklamasi cukup tinggi. Kegiatan reklamasi memiliki pengaruh besar dalam memenuhi kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha oleh masyarakat. Namun perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatkan laju sedimentasi, sehingga berdampak pada ekosistem sumber daya pesisir dan keterbatasan ruang tangkapan ikan bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya di wilayah perairan pesisir.

Anonim (2009), menyatakan bahwa reklamasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain pada peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, perbaikan *rejim hidraulik* kawasan pantai, dan penyerapan tenaga kerja. Reklamasi banyak memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah. Praktek ini memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran wilayah, penataan daerah pantai, menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari. Hasil reklamasi dapat menahan gelombang pasang yang mengikis pantai. Dampak negatif dari reklamasi pada lingkungan pesisir meliputi dampak fisik seperti perubahan *hidro-oseanografi*, erosi pantai, sedimentasi, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut,

perubahan rejim air tanah, peningkatan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir. Dampak biologis berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, *estuaria* dan penurunan keanekaragaman hayati.

Tingkat Kepentingan Responden Terhadap Kegiatan Penambangan Batu dan Pasir

Deskripsi hasil penelitian mengenai kegiatan penambangan batu dan pasir dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum sejauh mana tingkat kepentingan responden terhadap kegiatan penambangan batu dan pasir yang ada di wilayah pesisir TAD. Hasil analisis diskriptif terhadap kegiatan penambangan batu pasir di wilayah pesisir TAD dianggap responden memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan skor lebih dari 3 yaitu 3,25. Hal ini disebabkan aktivitas tersebut merupakan salah satu sumber mata pecaharian masyarakat sehingga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat, tetapi kegiatan ini menyebabkan erosi dan abrasi sehingga menyebabkan degradasi lingkungan dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap ekosistem sumber daya pesisir. Dengan demikian diperlukan strategi yang dapat memberikan solusi terhadap aktivitas kegiatan penambangan batu dan pasir tersebut.

Anonim (2009), memaparkan bahwa dampak dari penambangan batu dan pasir secara liar mengakibatkan abrasi sangat parah, diantaranya berpotensi meneggelamkan beberapa pulau kecil dan hilangnya vegetasi mangrove di pesisir pantai. Salah satu cara mencegah abrasi dilakukan dengan pelestarian hutan bakau, tidak hanya dilakukan penanaman saja, namun juga pemeliharaan agar tanaman bakau dapat tumbuh dengan baik. Masyarakat harus mengambil peran dalam mengatasi masalah abrasi dan pencemaran pantai, karena usaha dari pemerintah saja tidak cukup tanpa bantuan dari masyarakat.

Tingkat Peran serta Masyarakat

Tabel 2. Tahapan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Tahap	Langkah-langkah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir	Keterangan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Program/proyek pemerintah - Akses Informasi dalam proses pengelolaan wilayah pesisir - Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir - Keoptimalan dalam pengajuan usulan pada rencana pengelolaan wilayah pesisir
2	Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi rencana program pengelolaan wilayah pesisir
3	Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas rencana, program yang telah disusun dan dilaksanakan
4	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi terhadap jalannya proses pengelolaan wilayah pesisir - Kelebihan dan kelemahan dari rencana pengelolaan wilayah pesisir.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir mengenal prinsip keseimbangan pembangunan dan konservasi guna mewujudkan pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan. Konsep konservasi ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi sumber daya wilayah pesisir. Sebagian besar masyarakat pemanfaat pesisir Teluk Ambon Dalam memiliki tingkat peran serta rendah terhadap kegiatan konservasi yang hanya melakukan 1 tahap saja, yaitu tahapan implementasi dengan prosentase sebesar 72,7 %. Pada tingkat peran serta sedang dengan prosentase sebesar 27,3 % (Tabel 3) yang hanya melakukan 2 tahap dalam kegiatan konservasi yaitu tahapan implementasi dan pemantauan.

Berdasarkan hasil penelitian, umumnya masyarakat pemanfaat pesisir TAD tidak tergolong tingkat peran serta tinggi yang melakukan 4 tahap pengelolaan yaitu tahap perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini tampak pada Tabel 3 yang menunjukkan tingkat peran serta pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir TAD tergolong sedang dan rendah.

Tabel 3. Tingkat Peran serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam

Kelompok	Tingkat	Peran serta Pemanfaat Pesisir	Persen (%)
1	Rendah	Melakukan 1 tahap dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu tahap implementasi	72,7
2	Sedang	Melakukan 2 tahap dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu tahap implementasi dan pemantauan	27,3
Jumlah			100

Tahap implementasi yaitu masyarakat turut berperan serta dalam pelaksanaan program serta menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai, sedangkan tahap pemantauan, yaitu masyarakat turut berperan serta dalam memantau efektivitas terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai. Peran serta pemerintah dalam kegiatan atau program konservasi hanya pada kegiatan-kegiatan perencanaan biasanya diwakili oleh Kepala Desa dan Pemerintah Daerah, sedangkan kegiatan lapangan tidak sepenuhnya ditangani sendiri tetapi diserahkan kepada kelompok pelaksana lapangan, sehingga keberhasilannya tergantung masyarakat sekitar lokasi konservasi. Oleh karena itu pemerintah hendaknya mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat melalui perencanaan program yang benar-benar memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan, serta evaluasi dalam kegiatan konservasi dapat dimanifestasikan dengan membentuk kelompok atau organisasi masyarakat yang menjadi penyalur peran serta nya. Pembentukan kelompok ini memerlukan inisiator yang dipercaya agar dapat menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam suatu program.

Faktor-Faktor yang Membedakan Kelompok Tingkat Peran serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam

Peran serta masyarakat dalam 4 tahap pengelolaan wilayah pesisir akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembangunan pengelolaan wilayah pesisir. Faktor-faktor yang membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah persepsi masyarakat, pendidikan, pendapatan dan umur.

Berdasarkan hasil analisis diskriminan dengan signifikansi pada tingkat kesalahan 5 % diketahui bahwa terdapat perbedaan secara signifikan skor variabel persepsi masyarakat, pendidikan dan pendapatan antara kelompok tingkat peran serta masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji F pada variabel persepsi masyarakat sebesar 77,779 dengan signifikansi 0,000; pendidikan dengan nilai uji F sebesar 6,841 dengan signifikansi sebesar 0,014, sedangkan nilai uji F pada pendapatan sebesar 6,344 dengan signifikansi 0,015. Pada bagian lain, variabel umur tidak signifikan sebesar 0,135 dengan memiliki nilai uji F sebesar 2,308. Tidak signifikannya variabel umur menunjukkan tidak adanya perbedaan variabel umur antara kelompok tingkat peran serta masyarakat sehingga variabel umur tidak berperan dalam membedakan kelompok tingkat peran serta.

Berdasarkan hasil analisis diskriminan terhadap faktor-faktor yang membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat, maka didapatkan persamaan fungsi diskriminan yaitu :

$$\text{Fungsi diskriminan : } -2,69 + \text{Ln } 2,069 \text{ X1 (umur) } + \text{Ln } 1,355 \text{ X2 (pendidikan) } - \text{Ln } 0,451 \text{ X3 (pendapatan) } + \text{Ln } 3,950 \text{ X4 (persepsi pesisir)}$$

Berdasarkan persamaan fungsi diskriminan menunjukkan bobot diskriminan yang paling besar adalah persepsi masyarakat tentang pesisir sebesar Ln 3,950 dengan korelasi positif. Hal ini berarti peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir TAD lebih dipengaruhi oleh persepsi. Peningkatan persepsi akan menghasilkan peran serta yang lebih meningkat lagi.

Menurut Wirawan (1983), persepsi adalah suatu proses kesadaran seseorang dalam merespon rangsangan yang diperhatikan, diterima, dipahami dan dibuat interpretasi, evaluasi, pemaknaan dan prediksi secara subyektif yang pada gilirannya menentukan perilaku (pemikiran, perasaan, sikap) dan tindakan seseorang. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau, kebutuhan, dan suasana hati. Persepsi responden tentang pesisir dipengaruhi oleh pengalaman dalam pengelolaan wilayah pesisir (Saptorini, 2003). Keterlibatan seseorang dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan sampai evaluasi maka akan mempengaruhi perilaku persepsi seseorang. Namun, sejauh ini program pengelolaan wilayah pesisir kurang melibatkan masyarakat sebagai pengguna utama sumber daya. Selain itu pemahaman responden mengenai pesisir terhadap sumber daya yang ada lebih mengarah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tanpa memahami nilai sumber daya dengan mengabaikan dampak ekologis, sehingga pemanfaatan cenderung bersifat eksploitatif, perusakan dan pencemaran ekosistem.

Terbentuknya persepsi mengenai keberadaan sumber daya pesisir memberikan manfaat untuk kelangsungan kehidupannya, maka dalam tindakannya mereka akan berupaya kearah terbentuknya komunitas sumber daya pesisir di daerahnya, selanjutnya apabila mereka telah menikmati secara langsung hasil dari keberadaan sumber daya pesisir tersebut akan mengakibatkan peran serta yang lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Babo dan Frochlich (1998) menunjukkan bahwa peran serta seseorang menjadi lebih baik lagi jika persepsi orang-orang di Sinjai Timur Sulawesi Selatan mulai melakukan konservasi mangrove setelah memiliki kebutuhan untuk melindungi pantai dan keberlanjutan dalam memetik hasilnya, atau penduduk Timika (Papua) yang menjaga mangrove baik-baik karena di sanalah sumber udang sungai dan Tambelo sebagai makanan mereka. Peran serta yang tumbuh dari dalam akibat persepsinya yang baik lebih berarti dibandingkan dengan peran serta yang tumbuh sebagai akibat adanya pengaruh dari luar, terlebih

lagi apabila peran serta tersebut disertai kesadaran bahwa aktivitasnya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, persepsi yang berkembang di masyarakat dalam memandang pentingnya kestabilan hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya memandang bahwa keterlibatan masyarakat bukanlah organisasi lingkungan, akan tetapi organisasi keagamaan dengan kemampuan mengarahkan berbagai aktivitas yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Organisasi ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menjaga dan memelihara lingkungan, dibanding organisasi lainnya. Bahkan skala menggerakkannya mencakup kalangan remaja sampai dewasa. Organisasi ini mampu mewacanakan pentingnya upaya untuk memelihara lingkungan dan upaya penyesuaian antara aktivitas pembangunan dengan fungsi lingkungan. Kesamaan persepsi inilah yang mampu membentuk kesadaran dan menggerakkan setiap kalangan tanpa dipengaruhi perbedaan latar belakang, sebab telah terbentuk persamaan persepsi yang mampu mempengaruhi perilaku dalam menjaga lingkungan, khususnya pengelolaan wilayah pesisir. Jika organisasi keagamaan dilibatkan dalam pengelolaan wilayah pesisir maka dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta lebih baik lagi.

Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir juga disebabkan terjadi pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang sejak lama berkembang dalam masyarakat dan merupakan budaya leluhur masyarakat Maluku dirasakan sudah mulai memudar. Nilai-nilai budaya tersebut, antara lain penghayatan dan pengalaman sasi sebagai sistem konservasi sumber daya alam. Persepsi mengenai budaya sasi dianggap sebagai penghambat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga diabaikan dalam proyek pembangunan. Badan-badan pemerintah masih cenderung mengutamakan segi produksi yang bersifat semu ketimbang segi konservasi. Apabila kebijaksanaan demikian secara terus menerus diterapkan tanpa kebijakan mendalam, cepat atau lambat akan membahayakan kelestarian ekosistem pesisir beserta segala biota asosiasinya.

Variabel pendapatan memiliki bobot diskriminan pada persamaan fungsi diskriminan sebesar $-\ln 0,451$ dengan korelasi negatif. Persamaan tersebut, menunjukkan bahwa dengan meningkatkan pendapatan maka akan menurunkan peran serta. Tingginya pendapatan seseorang identik dengan tingkat konsumsi penduduk dengan gaya hidup masyarakat yang berhubungan dengan tingkat penggunaan produk tertentu. Penggunaan produk oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat tinggi maka tingkat penggunaan produk pun akan tinggi, yang tentu saja akan sangat berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan.

Semakin tinggi pendapatan maka tingkat kepentingan terhadap kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD juga meningkat. Tingginya kepentingan terhadap kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD yang seiring dengan meningkatnya konsumsi penduduk berpengaruh terhadap buangan sampah yang dihasilkan dimana hal ini berkaitan dengan besarnya pendapatan seseorang. Sejauh ini sampah yang dihasilkan tidak terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan pencemaran dan berdampak terhadap sumber daya pesisir disekitarnya. Hal ini perlu adanya ketegasan dari pemerintah baik dalam penegakan hukum bagi yang melanggar aturan maupun dengan tersedianya sarana untuk mengatasi kerusakan lingkungan pesisir agar mendorong masyarakat untuk berperan serta lebih baik.

Berdasarkan persamaan fungsi diskriminan terhadap variabel pendidikan memiliki bobot diskriminan sebesar $\ln 1,355$ dengan korelasi positif. Hal ini berarti variabel pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam membedakan antara kelompok tingkat peran serta masyarakat. Dari

fungsi persamaan tersebut didapatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan meningkatkan peran serta .

Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan penguasaan terhadap pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang terbatas telah menyebabkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya pesisir terbatas pula, sehingga berakibat pada rendahnya kesadaran mereka dalam melestarikan sumber daya pesisir serta kemampuan bersaing dengan pihak luar rendah. Menurut Sorjani, Achmad, dan Munir (1987), tingkat pendidikan sangat menentukan sebagai alat penyampaian informasi kepada manusia tentang perlunya perubahan dan untuk merangsang penerimaan gagasan baru.

Menurut hasil pengamatan dan wawancara dengan sebagian nelayan, pendidikan mereka pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam kegiatan perikanan, di mana para nelayan agak sulit menerima teknologi yang baru, juga karena rendahnya pemahaman terhadap ekosistem sekitarnya yang dimanfaatkan, sehingga kegiatan pemanfaatan cenderung merusak lingkungan.

Strategi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam

Tabel 4. Identifikasi Komponen SWOT Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber daya alam. 2. Dukungan pemerintah terhadap kegiatan pelabuhan, industri dan perikanan. 3. Terdapatnya budaya sasi dalam pengelolaan sumber daya alam (kearifan lokal). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. 2. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir. 3. Tingginya daya beli masyarakat pesisir TAD yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah secara baik. 4. Rendahnya persepsi masyarakat mengenai wilayah pesisir. 5. Keberagaman etnik berkaitan dengan pemanfaatan pesisir.
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya UU No. 27 Tahun 2007. 2. Terdapatnya kawasan konservasi hutan mangrove. 3. Permintaan produk perikanan tinggi. 4. Kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepentingan terhadap kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir TAD tinggi namun mengabaikan dampak ekologis terhadap ekosistem sumber daya pesisir. 2. Tekanan terhadap eksploitasi sumber daya. 3. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar <i>stakeholder</i> yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Tabel 5. Matrik Strategi Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan aktif semua <i>stakeholders</i> sekaligus sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir. 2. Penerapan budaya sasi (kearifan lokal) dalam pengelolaan wilayah pesisir. 3. Meningkatkan kapasitas nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan aktif semua <i>stakeholders</i> sekaligus sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir. 2. Membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Ancaman (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan aktif semua <i>stakeholders</i> sekaligus sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir. 2. Memanfaatkan dukungan semua pihak dalam menekan dampak negatif dari kegiatan untuk meminimalisir tingkat kerusakan wilayah pesisir Teluk Ambon Dalam. 3. Membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan aktif semua <i>stakeholders</i> sekaligus sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir. 2. Membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Arahan Untuk Pengelolaan

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka sebagai upaya peningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir maka diterapkannya sebuah strategi yang komprehensif yang dikenal dengan konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*co-management*) untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat mengharuskan masyarakat memiliki kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan. Melalui konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*co-management*), maka beberapa arahan untuk pengelolaan ke depan dikemukakan sebagai berikut:

- Perlu dilakukan pendampingan masyarakat atau disebut juga motivator, fasilitator, penggerak masyarakat dalam mengajak masyarakat untuk terlibat aktif di dalam pengelolaan wilayah pesisir. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk membantu menghubungkan masyarakat dengan pihak luar atau berkerja sama seperti tukar-menukar informasi serta memberikan penyuluhan agar masyarakat dibekali pengetahuan, ketrampilan khususnya mengenai lingkungan hidup serta peranannya secara timbal balik dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk secara efisien dan efektif mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kelembagaan.

- Penerapan pengelolaan tradisional (kearifan lokal) perlu dikembangkan serta dipadukan ke dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat.
- Pengembangan mata pencaharian yang ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap produktivitas sumber daya yang terbatas. Pengembangan mata pencaharian dapat berupa memperkenalkan (introduksi) mata pencaharian yang dapat dilakukan baik di laut maupun di daratan (misalnya: pemanfaatan lahan/pekarangan sempit, budidaya rumput laut atau ikan), pengembangan serta perbaikan mata pencaharian yang sudah ada, dan upaya kampanye untuk menentang metode-metode pemanfaatan yang destruktif.
- Semua kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir harus dijalankan berdasarkan keterpaduan antarsektor, keterpaduan antartingkat pemerintahan, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, dan keterpaduan ruang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan di pesisir Teluk Ambon Dalam memiliki tingkat kepentingan tergolong tinggi yang ditunjukkan dengan besarnya pengaruh kegiatan pemanfaatan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi dampaknya terhadap sumber daya pesisir akibat kegiatan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan menjadi ancaman yang serius, sedangkan tingkat peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir rendah yang ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat pada tahap implementasi dan pemantauan.
2. Faktor-faktor pendidikan, persepsi dan pendapatan yang membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat pemanfaat pesisir, sedangkan faktor umur tidak berperan dalam membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat.
3. Strategi meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah dengan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*co-management*), dengan masyarakat memiliki kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan.

REFERENSI

- Anonim. (2008). *Data dan analisis profil sumber daya kelautan dan perikanan*. Ambon: Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Anonim. (2009). *Monitoring teluk Ambon*. Ambon: Balitbang Sumber daya Laut P3O LIPI.
- Babo, N. R., & Froeclhich, J. W. (1998). *Community-based mangrove rehabilitation: A lesson learned from East Sinjai*. South Sulawesi, Indonesia. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2011, dari <http://www.Glomis.com> ().
- Dahuri, R., Rais, J. Ginting, S.P., & Sitepu, M.J. (2004). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Pelasula, D.D. (2009). *Dampak perubahan lahan atas terhadap ekosistem teluk Ambon*. Tesis magister yang tidak dipublikasikan. Universitas Pattimura, Ambon.
- Saptorini. (2003). *Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi hutan mangrove*. Tesis magister yang tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjani, R., Achmad, & Munir, R. (1987). *Lingkungan sumber daya alam dan kependudukan dalam pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2002). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia.

Suratmo, F.G. (1995). Analisis mengenai dampak lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wirawan, S. (1983). *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali.